

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang tidak pernah luput dari perhatian pemerintah negara seluruh belahan dunia. Kemiskinan bahkan menjadi suatu fenomena dalam bidang ekonomi yang menjadi titik acuan keberhasilan pemerintah suatu Negara dari waktu ke waktu, khususnya bagi negara berkembang seperti (Asia, Amerika Latin, dan Afrika). Hal ini disebabkan oleh minimnya fasilitas, dan sarana penunjang kesejahteraan hidup masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyadari bahwa persoalan kemiskinan perlu mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak terutama bagi pemerintah. Kemiskinan sendiri bahkan menjadi masterplan perencanaan pembangunan jangka panjang guna meningkatkan perekonomian dan mengurangi tingkat kemiskinan (Fadillah, Rahmi and Riani, 2022).

Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut Mahsunah (2018) kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tinjauan kemiskinan dari dimensi ekonomi ini diartikan sebagai ketidak mampuan seseorang untuk mendapatkan mata pencaharian yang mapan dan memberikan penghasilan yang layak untuk menunjang hidupnya secara berkesinambungan yang terlihat dari rendahnya gizi

makanan, tingkat kesehatan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, pakaian yang tidak layak, dan sebagainya. Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lainnya yang melingkupinya.

Jawa Barat merupakan Provinsi dengan tingkat persentase penduduk miskin ke 3 di Pulau Jawa, setelah DKI Jakarta, dan Banten, yang dimana DKI Jakarta memiliki persentase sebesar 4,69%, dilanjutkan oleh Banten sebesar 6,16%, lalu Provinsi Jawa Barat dengan persentase 8,06% dilanjutkan oleh provinsi Jawa Timur sebesar 10,38%. Jawa Barat memiliki luas wilayah sebesar 35222 km², dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari lima puluh juta jiwa pada tahun, Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat terus berfluktuasi dari tahun ke tahun yang dimana tahun sebelumnya di 2021 sebesar 7,97% yang artinya terjadi peningkatan pada tahun ini. Hal ini menandakan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dan penurunan, pemerintah tidak pernah lepas tangan dalam melaksanakan pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan penjelasan diatas, Peneliti mengasumsikan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, yang diantaranya adalah Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum, yang dimana akan peneliti di buktikan dari gambar 1.1 dibawah ini.



Gambar 1.1. Pengeluaran pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Kemiskinan

Sumber: BPS Jabar 2022 (data diolah)

Dalam gambar 1.1, Berdasarkan gambar diatas, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi, yang dimana pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan di Provins Jawa Barat, jika diamati dengan seksama Saat tingkat kemiskinan menurun, hal tersebut diikuti oleh tingkat upah minimum yang tidak bertambah secara signifikan, serta pertumbuhan ekonomi yang meningkat ditambah dengan bertambahnya pengeluaran pemerintah, yang dimana saat kemiskinan berada sebesar 9,53% dan turun di angka 8,95%, upah minimum juga terlihat melemah dari 2,75% ke 2,73%, diikuti dengan pertumbuhan ekonomi dari 4,35% menjadi 5,1%, dan pengeluaran pemerintah yang semula di angka 28Milyar, di tahun berikutnya dapat mencapai 31 Milyar (BPS, 2022).

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah yang arif akan memanfaatkan anggaran belanjanya untuk pembangunan perekonomian di daerahnya termasuk pengentasan kemiskinan sehingga, terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan Ekonomi yang baik adalah indikasi dimana suatu daerah telah berhasil mengentaskan atau mengurangi tingkat kemiskinan, karena pendapatan masyarakatnya terus bertumbuh sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan makmur, dan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya (Khumairoh et al., 2018).

Upah Minimum menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas perekonomian. Upah Minimum yang tinggi dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Upah Minimum sendiri merupakan salah satu faktor yang dianggap mampu meningkatkan kemiskinan, hal ini dikarenakan apabila upah minimum naik maka, harga barang-barang umum akan mengalami kenaikan, hal tersebut membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga, hal ini mampu menurunkan kesejahteraan masyarakat (Agung Istri Diah Paramita and Bagus Putu Purbadharmaja, 2016).

Melihat keterkaitan tersebut, pemerintah memiliki fungsi dalam mengentaskan tingkat kemiskinan yang ada pada masyarakat, selain itu

masyarakat juga diharapkan mampu berpartisipasi pada pertumbuhan ekonomi dengan menjaga konsumsi rumah tangganya di tengah-tengah meningkatnya tingkat Upah Minimum yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dari asumsi tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kemsikinan di Provinsi Jawa Barat ?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat ?
3. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat ?
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat ?

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh upah minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat ?

1.4. Ruang Lingkup

Penelitian mencakup series data selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 pada Provinsi Jawa Barat. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu tingkat Kemiskinan sebagai variabel dependen, serta pengeluaran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum sebagai variabel independen.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum, sebagai alat untuk menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan serta bahan studi komparatif penelitian lain yang berkaitan dengan analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, dan Upah Minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
2. Bagi Universitas, dapat menambah acuan akademis dan koleksi perpustakaan Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur & perpustakaan pusat UPN “Veteran” Jawa Timur dalam membahas ataupun memecahkan masalah yang sama.
2. Peneliti Selanjutnya, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang cara penulisan karya ilmiah yang baik dan sekaligus melatih diri untuk memecahkan masalah.